



RENCANA KERJA TAHUN 2024



DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM



KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 Dinas Perhubungan Kota Batam disusun sebagai bahan pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan tahun 2024 yang telah ditetapkan prioritas pembangunan yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan di Kota Batam secara signifikan.

Rencana Kerja (RENJA) ini menjadi acuan seluruh Bidang di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Batam sebagai pedoman kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diembannya dan dapat diselesai dengan baik dan tepat waktu.

Demikian Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2024 disusun semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan dan membutuhkan.

Batam, 21 Juli 2023

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BATAM**



SALIM, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP.19681021 199010 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan.....	10
1.4. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2022 DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan Kota Batam ..	13
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan	17
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan	19
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	22
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ..	26
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	28
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan Tahun 2024	30
3.3. Program dan Kegiatan	32
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	39
BAB V PENUTUP	51

DAFTAR TABEL

	Hal
II.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Pencapaian Renstra Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2022	14
II.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2022	18
II.3 Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Pelayanan pada Kegiatan Tahun 2022 Dinas Perhubungan	20
II.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Dinas Perhubungan Kota Batam	23
II.5 Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Dinas Perhubungan Kota Batam	26
III.2 Tujuan dan Sasaran Kerja Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2024	31
III.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Dinas Perhubungan Kota Batam	36
IV.1 Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2024 (Tabel berasal dari SIPD-RI)	40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

1.1.1. Pengertian Renja Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, pasal 13 ayat (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Dalam prosesnya, penyusunan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Strategi (Renstra) RKPD. Berdasarkan dari keinginan mewujudkan harapan itu

dibutuhkan perencanaan pembangunan yang baik. Perencanaan pembangunan sebagai proses manajemen maupun sebagai suatu kebijakan adalah merupakan tahapan awal dari proses pembangunan yang sangat penting dalam menentukan arah pembangunan daerah. Mengingat peran dan fungsi Renja Dinas Perhubungan Kota Batam sangat penting bagi Pemerintah Kota Batam, maka proses penyusunannya dilakukan sistematis dan partisipatif oleh seluruh aparatur Dinas Perhubungan Kota Batam dan masyarakat untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang tepat dan berkesinambungan.

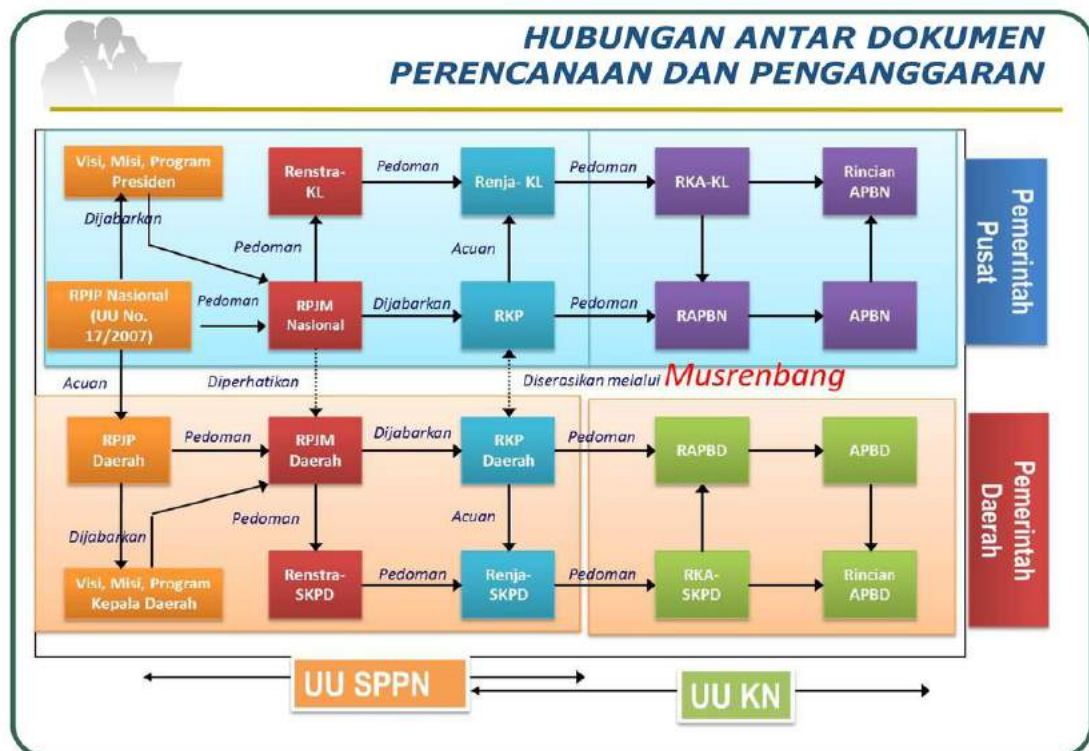
1.1.2. Proses Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, adalah meliputi:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

1.1.3. Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan lainnya

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengatur tahapan perencanaan pembangunan jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek (1 tahun), baik yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat (termasuk kementerian/lembaga=KL) maupun pemerintah daerah (termasuk satuan kerja perangkat daerah = SKPD). Pada tingkat daerah, perencanaan pembangunan yang dihasilkan berupa dokumen-dokumen: Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP Daerah) untuk jangka panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) untuk jangka menengah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk jangka pendek. Keterkaitan antar dokumen perencanaan berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 ini dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut:



1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kota Batam adalah :

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
- 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 6) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
- 7) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - 8) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penatan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 - 9) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
 - 10) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 - 11) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 - 12) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 13) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 14) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 - 15) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 - 16) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - 17) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 - 19) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42) ;
 - 20) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6323);
 - 21) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 - 22) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 - 23) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas;
 - 24) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
 - 25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

- 26) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
- 27) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 28) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
- 29) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 30) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 31) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- 32) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 33) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);

- 34) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
- 35) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- 36) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
- 37) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 54);
- 38) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 37);
- 39) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67);
- 40) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam

- Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 87);
- 41) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 108);
 - 42) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 119);
 - 43) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7);
 - 44) Peraturan Walikota Batam Nomor 76 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 862);
 - 45) Peraturan Walikota Batam Nomor 224 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 1092);
 - 46) Peraturan Walikota Batam Nomor 65 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2024;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja adalah untuk merumuskan rencana kerja Dinas Perhubungan Kota Batam untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Batam

1.3.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah sebagai pedoman :

1. pelaksanaan program/kegiatan Dinas tahun 2024
2. monitoring, evaluasi dan pengendalian dalam pelaksanaan program/kegiatan Dinas Perhubungan
3. penyusunan rencana anggaran Dinas Perhubungan

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Landasan Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.4. Sistematika Penulisan
- BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
 - 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
 - 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
 - 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat
- BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM
- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
 - 3.2. Tema, Tujuan dan sasaran Pembangunan Kota Batam dalam RKPD Tahun 2024

3.3. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

3.4. Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2022 DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM

Pelaksanaan evaluasi sebagai sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Renja Dinas Perhubungan Kota Batam tahun 2022 didasarkan pada Renstra Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2021 - 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2021 - 2026, untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA 2022 DAN CAPAIAN RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM

Jumlah pagu anggaran Tahun 2022 Dinas Perhubungan Kota Batam yang terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal sebesar Rp.55.465.126.765,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp.51.830.250.700,00 atau sebesar 93,45%.

Dalam penganggaran tahun 2022 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Dinas Perhubungan melaksanakan 3 Program dan 14 kegiatan. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2022 dan Capaian Rencana Kerja dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut:

TABEL II.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM TAHUN 2022

Tabel T.C-29

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.15.	URUSAN PERHUBUNGAN									
2.15.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100%	100%	100%	92%	92%	100%	100%	100%
2.15.01.2.02	KEGIATAN Administrasi Keuangan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.15.01.2.04	KEGIATAN Administrasi kepegawaian Perangkat	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	0%	-	-	0%	100%	100%	100%
2.15.01.2.06	KEGIATAN Administrasi Umum	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.15.01.2.07	KEGIATAN Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.15.01.2.08	KEGIATAN Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.15.01.2.09	KEGIATAN Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.15.01.2.10	KEGIATAN Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pelayanan BLUD yang difasilitasi sesuai ketentuan	100%	90%	90%	90%	100%	90%	90%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.15.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun	81%	7%	61%	53%	87%	71%	71%	88%
		Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun	4.199 Unit	2.656 Unit	3.197 Unit	2.746 Unit	86%	3.698 Unit	3.698 Unit	88%
2.15.02.2.01	KEGIATAN Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Perencanaan Bidang Perhubungan yang disusun	100%	-	100%	-	0%	100%	100%	100%
2.15.02.2.02	KEGIATAN Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Perengkapan Jalan yang dibangun setiap tahunnya	100%	46%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.15.02.2.06	KEGIATAN Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan APILL di Persimpangan Jalan Kota	85%	54%	63%	56%	89%	75%	75%	89%
		Jumlah Jukir yang melaksanakan transaksi Non Tunai	200 Orang Jukir	0	0	0	0%	100 Orang Jukir	100 Orang Jukir	50%
2.15.02.2.04	KEGIATAN Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Titik Parkir yang dikelola	91%	70%	84%	70%	83%	88%	88%	97%
		Persentase Kendaraan Wajib Uji yang Lulus Uji	78%	65%	73%	62%	85%	75%	75%	-
2.15.02.2.05	KEGIATAN Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Operasional Pelayanan PKB	67%	96%	61%	100%	164%	64%	64%	-
2.15.02.2.08	KEGIATAN Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Pelaksanaan Operasi Terpadu Pengamanan Penertiban Lalu Lintas selama 1 tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
		Persentase tingkat pelayanan Operasional Bus Trans Batam	41%	38%	27%	21%	78%	33%	33%	-
2.15.02.2.09	KEGIATAN Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan Operasional Bus Trans Batam (Koridor)	100%	80%	90%	80%	89%	90%	90%	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.15.03.	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap transportasi laut	49%	49%	49%	40%	82%	49%	49%	100%
2.15.03.2.06	KEGIATAN Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Dan/Atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	Persentase pulau yang terlayani oleh transportasi laut	100%	67%	67%	67%	100%	67%	67%	67%
2.15.03.2.12	KEGIATAN Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase prasarana perhubungan laut yang dikelola dalam kondisi baik	100%	100%	100%	84%	84%	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel evaluasi pelaksanaan rencana kerja Dinas Perhubungan tahun 2022 dan capaian sasaran, program dan kegiatan, yang disajikan tidak semuanya mencapai 100%. Hal ini mengingat beberapa pekerjaan tidak dapat dianggarkan sesuai target yang sudah ditetapkan, sebagaimana dapat dijelaskan pada uraian berikut ini:

1. Indikator Kinerja Program *jumlah sarana dan prasarana perhubungan yang dibangun* pada tahun 2022 ditargetkan sejumlah 541 unit hanya dapat dianggarkan sebanyak 90 Unit yang terdiri dari pembangunan rambu-rambu keselamatan lalu lintas sehingga hanya terealisasi sebesar 86%.
2. Indikator Kinerja Program *Persentase Kendaraan Wajib Uji yang Lulus Uji* mencapai 62% atau 85% dari yang ditargetkan hal ini dikarenakan kesadaran para pemilik kendaraan umum dan barang untuk melakukan uji keur masih sangat kecil.
3. Indikator Kinerja Program *Persentase tingkat pelayanan Operasional Bus Trans Batam* tahun 2022 mencapai 78% berdampak dari jumlah penumpang Trans Batam yang belum maksimal akibat dari kesadaran masyarakat untuk naik transportasi umum belum sepenuhnya.
4. Indikator Kinerja Program *Tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap transportasi laut* mencapai 82%, secara penumpang yang memanfaatkan transportasi laut sudah melebihi dari target yang ditetapkan karena riit kapal bertambah sehingga daya tampung kapal yang disediakan juga menjadi lebih besar.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Batam didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, disajikan pada Tabel 2.2, sebagai berikut:

TABEL II.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM
TAHUN 2022

Tabel T.C-30

NO	INDIKATOR	SPM / STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH					REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	
1	Persentase sarana prasarana perhubungan yang tersedia dan terkelola di perkotaan			75%	84%	89%	95%	100%	53%	-	89%	95%	
2	Persentase tersedianya angkutan umum yang layak yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kota			41%	44%	44%	45%	48%	47%	-	44%	45%	
3	Persentase sarana dan prasarana perhubungan yang tersedia dan terkelola di wilayah hinterland			88%	91%	94%	97%	100%	84%	-	94%	97%	

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN

Berdasarkan Peraturan Walikota Batam No. 53 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dinas Perhubungan, Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang perhubungan daerah sesuai dengan kewenangannya

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di Bidang Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Prasarana Perhubungan, dan Angkutan Laut
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Bidang Lalu Lintas, Angkutan jalan, Prasarana Perhubungan, dan Angkutan laut.
- c. pembinaan dan pelaksanaan di Bidang Lalu Lintas, Angkutan jalan, Prasarana Perhubungan, dan Angkutan laut.
- d. pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Dinas.
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Batam tahun 2022, terdapat beberapa kendala dan hambatan antara lain adalah :

TABEL II.3
FAKTOR PENGHAMBAT dan FAKTOR PENDORONG PELAYANAN
PADA KEGIATAN TAHUN 2022
DINAS PERHUBUNGAN

NO	KEGIATAN OPD	PERMASALAHAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1	KEGIATAN Administrasi Umum Perangkat Daerah	Masih rendahnya ketersediaan kebutuhan operasional administrasi perkantoran	Alokasi Anggaran yang belum optimal untuk kebutuhan operasional kantor	Melakukan Inventarisasi Kebutuhan Administrasi Perkantoran dengan lebih baik lagi
2	KEGIATAN Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Masih minimnya sarana dan prasarana perkantoran	Perencanaan yang belum optimal dan masih rendahnya anggaran untuk pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	Melakukan inventarisasi Kebutuhan pemeliharaan dan penataan sarana dan prasarana aparatur
3	KEGIATAN Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	banyak sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi kurang baik	Perencanaan yang belum optimal dan masih rendahnya anggaran untuk pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	Melakukan inventarisasi Kebutuhan pemeliharaan dan penataan sarana dan prasarana aparatur
4	KEGIATAN Peningkatan Pelayanan BLUD	Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan pelayanan Bus Trans Batam	belum optimalnya konsep multimoda (Konektivitas antar angkutan masih kurang)	Ketersediaan jumlah Bus yang maksimal
5	KEGIATAN Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Rambu yang terkait dengan kepemilikan aset jalan di kota Batam	Banyaknya ruas jalan yang masih dalam tahap pelebaran/peningkatan	Adanya kewenangan pembangunan sarana dan prasarana Lalu Lintas di Jalan yang merupakan aset Kota Batam
6	KEGIATAN Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalulintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Traffic Light yang belum terintegrasi diseluruh persimpangan di kota Batam	Banyaknya ruas jalan yang masih dalam tahap pelebaran/peningkatan	Optimalisasi kinerja dan fungsi Traffic Light/ATCS
7	KEGIATAN Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan layanan parkir sebagai bentuk keselamatan lalu lintas bagi pengguna jalan	Masih kurangnya etika dalam memberikan pelayanan, pengawasan, pembinaan dan pendidikan para Juru Parkir sebagai pelayanan kepada masyarakat	Adanya Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir
8	KEGIATAN Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor masih rendah	Rendahnya kesadaran masyarakat dan pemilik kendaraan wajib uji untuk melaksanakan Uji Kir	Pelaksanaan Razia Kendaraan Penumpang dan Angkutan Barang serta dibuka nya pelayanan uji Kir pada hari libur
9	KEGIATAN Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Pelaksanaan Razia yang melibatkan instansi vertikal sehingga harus menyesuaikan waktu pelaksanaan	Masih kurangnya Personil yang memiliki kompetensi atau sertifikat penyidik	Rutin melaksanakan Razia Angkutan Penumpang dan barang guna meningkatkan disiplin dan keselamatan pengguna Jalan
		Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas	Kurangnya Jumlah Personil dan Sarana (kendaraan operasional) dalam melaksanakan pengawasan	Adanya Forum Lalu Lintas sesuai SK Walikota No. KPTS.50/HK/I/2018 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Batam

NO	KEGIATAN OPD	PERMASALAHAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
10	KEGIATAN Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan pelayanan Bus Trans Batam	belum optimalnya konsep multimoda (Konektivitas antar angkutan masih kurang)	Ketersediaan jumlah Bus yang maksimal
		Ketersediaan Bus Sekolah tidak seimbang dengan semakin meningkatnya jumlah pengguna	Kondisi Bus Sekolah yang sudah tidak layak lagi	Peremajaan angkutan Bus Sekolah
11	KEGIATAN Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Dan/Atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	Minimnya ketersediaan Sarana dan prasarana diwilayah hinterland yang tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat	Besarnya biaya operasional Kapal	Besarnya minat masyarakat hinterland dalam penggunaan Kapal Perintis sebagai sarana penyeberangan
12	KEGIATAN Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Terbatasnya DED yang dimiliki	Kurangnya dukungan pihak-pihak yang berkepentingan terutama dalam penyediaan lahan	Kebutuhan konektivitas masyarakat diwilayah hinterland

Isu Strategis yang dihadapi Dinas Perhubungan Kota Batam adalah:

1. Kebutuhan 11 Koridor Trans Batam dan penambahan 130 armada sampai dengan tahun 2022 belum tercapai;
2. Pengoperasian *feeder* untuk mendukung *integrated transportation system* belum terlaksana;
3. Belum optimalnya sistem pengelolaan perparkiran;
4. Belum optimalnya pengujian kendaraan terhadap kendaraan wajib uji (kendaraan angkutan penumpang dan barang)
5. Belum optimalnya jumlah sarana dan prasarana Perhubungan (seperti shelter/halte, transfer point, terminal, jembatan penyeberangan orang (JPO), *traffic light*, rambu lalu lintas, rambu pendahulu penunjuk jalan (RPPJ), rambu parkir, papan nama jalan, cansteen, pagar pemisah, guardrail, cemin tikungan, *display info*, *warning light*, marka jalan, marka parkir, pita

- penggaduh, zona selamat sekolah (ZoSS), zebra cross, dll) untuk meningkatkan keselamatan berlalu lintas;
6. Belum optimalnya konektivitas dan aksesibilitas transportasi ke wilayah kepulauan (*hinterland*);
 7. Belum terbentuknya moda transportasi yang modern di kota Batam;
 8. Belum optimalnya sarana dan prasarana operasional Dinas Perhubungan Kota Batam;

Dampak dan faktor penghambat dan pendorong terhadap visi misi Walikota yang terkait dengan capaian program dan formulasi penyelesaian dampak, yaitu ;

1. Jika pelaksanaan kegiatan terlambat atau tidak terlaksana akan berpengaruh pada target RPJMD dan mempengaruhi visi dan misi walikota. Hal ini bisa disebabkan rasionalisasi anggaran dan kondisi teknis lapangan
2. Tidak terserapnya aspirasi masyarakat melalui paket-paket pekerjaan dan juga akan mempengaruhi capaian target indikator
3. Belum maksimalnya serapan aspirasi masyarakat dan rencana kerja OPD

Penyelesaian dampak dapat dilakukan dengan peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan Meningkatkan Kinerja OPD.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2024 disajikan pada Tabel II.4 berikut ini :

TABEL II.4
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM

Tabel T.C-31

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Juta Rp)	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Juta Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.15.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100%	29.730.706.368	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah		
2.15.01.2.02	KEGIATAN Administrasi Keuangan	Kota Batam	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	12.936.177.744	KEGIATAN Administrasi Keuangan	Kota Batam	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	13.462.615.876,00
2.15.01.2.04	KEGIATAN Administrasi kepegawaian Perangkat	Kota Batam	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	304.212.000	KEGIATAN Administrasi kepegawaian Perangkat	Kota Batam	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	227.700.000,00
2.15.01.2.06	KEGIATAN Administrasi Umum	Kota Batam	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	247.246.212	KEGIATAN Administrasi Umum	Kota Batam	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	527.770.700,00
2.15.01.2.07	KEGIATAN Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100%	246.319.012	KEGIATAN Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100%	834.647.000,00
2.15.01.2.08	KEGIATAN Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam	Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%	2.665.671.400	KEGIATAN Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam	Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%	2.865.038.376,00
2.15.01.2.09	KEGIATAN Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	100%	831.080.000	KEGIATAN Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	100%	917.610.000,00
2.15.01.2.10	KEGIATAN Peningkatan Pelayanan BLUD	Kota Batam	Persentase Pelayanan BLUD yang difasilitasi sesuai ketentuan	100%	12.500.000.000	KEGIATAN Peningkatan Pelayanan BLUD	Kota Batam	Persentase Pelayanan BLUD yang difasilitasi sesuai ketentuan	100%	10.335.781.496,00

NO	RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Juta Rp)	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Juta Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.15.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun	81%	36.977.042.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun	81%	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun	4.199 Unit				Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun	4.199 Unit	
2.15.02.2.01	KEGIATAN Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kota Batam	Persentase Dokumen Perencanaan Bidang Perhubungan yang disusun	1 Dokumen	900.000.000	KEGIATAN Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kota Batam	Persentase Dokumen Perencanaan Bidang Perhubungan yang disusun	1 Dokumen	900.000.000,00
2.15.02.2.02	KEGIATAN Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Batam	Persentase Perengkapan Jalan yang dibangun setiap tahunnya	100%	2.892.711.700	KEGIATAN Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Batam	Persentase Perengkapan Jalan yang dibangun setiap tahunnya	100%	3.288.571.400,00
2.15.02.2.05	KEGIATAN Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalulintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Batam	Persentase Ketersediaan APILL di Persimpangan Jalan Kota	85%	6.128.338.300	KEGIATAN Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalulintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Batam	Persentase Ketersediaan APILL di Persimpangan Jalan Kota	85%	8.312.627.400,00
			Jumlah Jukir yang melaksanakan transaksi Non Tunai	200 Orang Jukir				Jumlah Jukir yang melaksanakan transaksi Non Tunai	100 orang Jukir	
2.15.02.2.03	KEGIATAN Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Kota Batam	Persentase Titik Parkir yang dikelola	91%	10.840.000.000	KEGIATAN Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Kota Batam	Persentase Titik Parkir yang dikelola	91%	5.458.019.500,00
			Persentase Kendaraan Wajib Uji yang Lulus Uji	78%				Persentase Kendaraan Wajib Uji yang Lulus Uji	78%	
2.15.02.2.04	KEGIATAN Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Batam	Persentase Operasional Pelayanan PKB	67%	740.523.000	KEGIATAN Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Batam	Persentase Operasional Pelayanan PKB	67%	960.074.000,00
2.15.02.2.06	KEGIATAN Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Kota Batam	Persentase Pelaksanaan Operasi Terpadu Pengamanan Penertiban Lalu Lintas selama 1 tahun	100%	275.469.000	KEGIATAN Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Kota Batam	Persentase Pelaksanaan Operasi Terpadu Pengamanan Penertiban Lalu Lintas selama 1 tahun	100%	194.400.000,00
			Persentase tingkat pelayanan Operasional Bus Trans Batam	41%				Persentase tingkat pelayanan Operasional Bus Trans Batam	41%	0,00
2.15.02.2.07	KEGIATAN Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam	Cakupan pelayanan Operasional Bus Trans Batam (Koridor)	100%	15.200.000.000	KEGIATAN Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam	Cakupan pelayanan Operasional Bus Trans Batam (Koridor)	100%	18.231.460.612,00

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Juta Rp)	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Juta Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.15.03.	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		Tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap transportasi laut	49%	8.877.016.820	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			49%	
2.15.03.2.06	KEGIATAN Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam	Persentasi pulau yang terlayani oleh transportasi laut	100%	1.600.000.000	KEGIATAN Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam	Persentasi pulau yang terlayani oleh transportasi laut	100%	2.072.630.064,00
2.15.03.2.12	KEGIATAN Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Kota Batam	Persentase prasarana perhubungan laut yang dikelola dalam kondisi baik	100%	7.277.016.820	KEGIATAN Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Kota Batam	Persentase prasarana perhubungan laut yang dikelola dalam kondisi baik	100%	17.080.081.500,00
					75.584.765.188					85.669.027.924,00

2.5. PENELAHAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Rencana Program dan kegiatan merupakan cara untuk mendukung arah dan kebijakan yang telah ditetapkan. Dinas Perhubungan dalam menyusun program dan kegiatan hampir 80% berhubungan dengan kepentingan masyarakat, usulan dari masyarakat yang ditampung dalam kegiatan berasal dari musyawarah pembangunan daerah dari tingkat Kelurahan, Kecamatan maupun Kota. Usulan Program dan kegiatan dari masyarakat dapat dilihat pada Tabel II.5, yaitu :

TABEL II.5
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN
DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2024
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM

Tabel T.C-32

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	BESARAN /VOLUME	CATATAN
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap transportasi laut			
	KEGIATAN Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpulan Lokal	Persentase prasarana perhubungan laut yang dikelola dalam kondisi baik			
1	Pembangunan Dermaga Rakyat		Pulau Nguan Kel. Galang Baru Kec. Galang	P = 65 meter L = 2 meter	
2	Pembangunan Dermaga Ponton		Kel. Tanjung Sari Kec. Belakang Padang	P = 10 meter L = 5 meter	
3	Pembangunan Dermaga Rakyat		Pulau Kasam Kel. Kabil Kec. Nongsa	P = 50 meter L = 2 meter	
4	Pembangunan Dermaga Rakyat dan Dermaga Ponton		Pulau Cengkui Kec. Bulang	P = 120 meter L = 2 meter	
5	Pembangunan Dermaga Rakyat		Pulau Panjang Timur Kec. Bulang	P = 130 meter L = 2 meter	
6	Pembangunan Dermaga Ponton		Pulau Terong, Kec. Belakang Padang	1 Unit	
7	Pembangunan Dermaga Rakyat		Batu Putih Kel. Karas Kec. Galang	P = 400 meter L = 2 meter	
8	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Pulau Panjang Kel. Sijantung Kec. Galang		Pulau Panjang, RT. 02 RW.02 Kel. Sijantung Kec. Galang	1 Paket P = 100 m L = 2 m	
9	Pembangunan Dermaga Rakyat		Pulau Seraya Kec. Bulang	P = 50 meter L = 1.5 meter	
10	Pembangunan Dermaga Rakyat		Pulau Labu Kec. Bulang	P = 52 meter L = 2 meter	
11	Pembangunan Dermaga Rakyat		Pulau Kubung RT.01. RW.03 Kel. Ngenang Kec. Nongsa	P = 73 meter L = 3 meter	

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	BESARAN /VOLUME	CATATAN
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)
12	Pembangunan Dermaga Rakyat		Kampung Baru RT. 02 RW. 03 Petong Utara, Kel. P. Abang Kec. Galang	P = 300 meter L = 2 meter V = 600 m ²	
13	Pembangunan Dermaga Rakyat		RT. 02 RW. 01 Pulau Sembur Kel. Galang Baru Kec. Galang	P = 30 meter L = 2 m	
14	Pembangunan Dermaga Rakyat		RT.02 RW 01 Pulau Korek Kel. Galang Baru Kec. Galang	P = 60 meter L = 2 m	
15	Pembangunan Dermaga Rakyat		Teluk Kangkung, RT.05 RW.03 Kel. P. Terong Kec. Belakang Padang	P = 12 meter L = 10 meter V = 120 m ²	
16	Pembangunan Dermaga Rakyat (lanjutan)		Pulau Pecong RT.04 RW.02 Kec. Belakang Padang	P = 150 meter L = 2 meter V = 300 m ²	
17	Pembangunan Dermaga Rakyat		Pulau Lingka RT. 21 RW. 06 Kel. Kasu Kec. Belakang Padang	P = 120 meter L = 2 meter V = 240 m ²	
18	Pembangunan Dermaga Ponton		Pulau Jaloh RT.06 RW.03 Kel. Pantai Gelam Kec. Bulang	1 Unit	
19	Pembangunan Dermaga Rakyat (Lanjutan Pelabuhan)		Pangkalan Pelam RT. 03, RW. 01 Kel. Pemping Kec. Belakang Padang	P = 50 meter L = 1,5 meter, V = 75 M ²	
20	Rehabilitasi/Pemeliharaan Dermaga Ponton		Pulau Akar	1 Unit	
21	Rehabilitasi/Pemeliharaan Pelantar Beton		Pulau Putri Kec. Nongsa	1 Unit	
22	Rehabilitasi/Pemeliharaan Pelantar Beton		Pulau Kasu kel. Kasu Kec. Belakang Padang	1 Unit	
23	Rehabilitasi/Pemeliharaan Dermaga Rakyat		RT 03 RW.01 kel. Pulau Abang Kec. Galang	P = 70 meter L = 2,5 meter	
24	Rehabilitasi/Pemeliharaan Dermaga Rakyat (Rehab Atap & Pengecatan Pagar Pelabuhan)		Pulau Kasu RT. 08 RW. 03 Kel. Kasu Kec. Belakang Padang	2 Unit	
25	Rehabilitasi/Pemeliharaan Dermaga Rakyat		RT. 02, RW. 01, Tanjung Pana Kel. Pemping Kec. Belakang Padang	P = 150 meter L = 2 meter, V = 300 M ²	
26	Rehabilitasi/Pemeliharaan Dermaga Rakyat (Pengatapan Pelabuhan)		Kampung Tengah RT. 03, RW. 01 Kel. Pemping Kec. Belakang Padang	P = 200 meter L = 2,5 meter, V = 500 M ²	
27	Rehabilitasi/Pemeliharaan Dermaga Rakyat (Rehab Total Atap "T" Pelabuhan)		Mongkol, RT. 01, RW. 02 Kel. Pemping Kec. Belakang Padang	P = 8 meter L = 10 meter, V = 80 m ²	

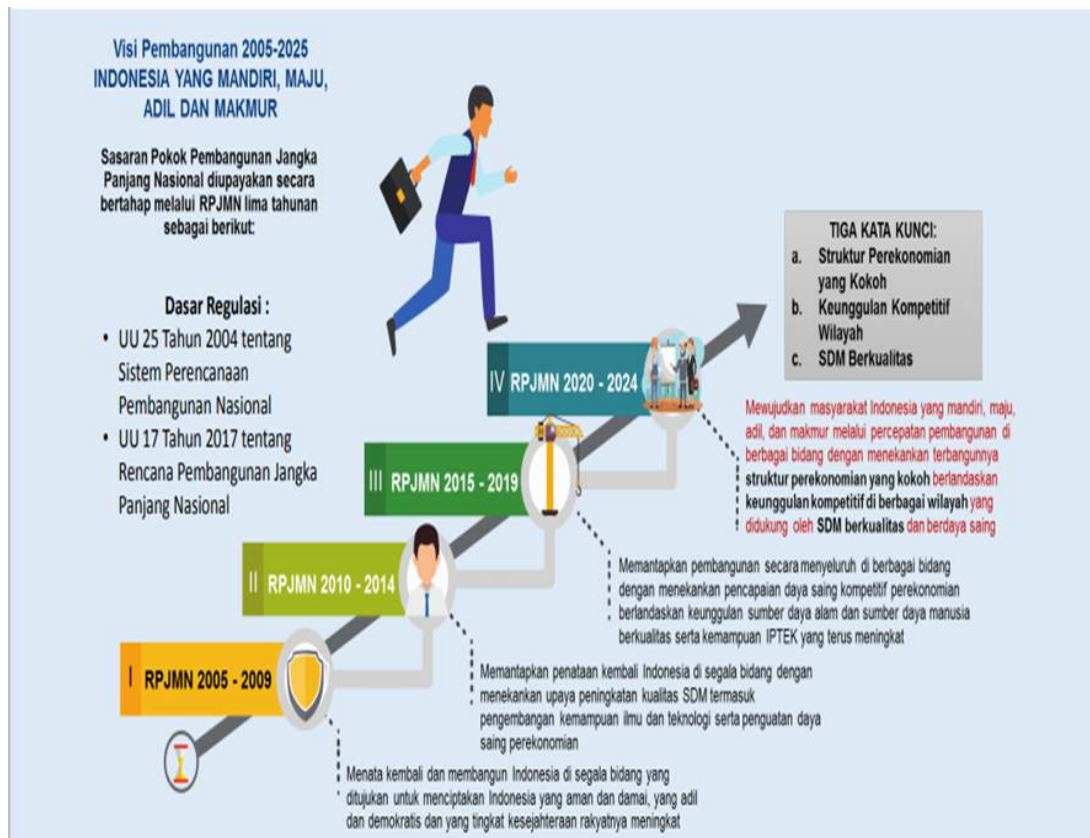
BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

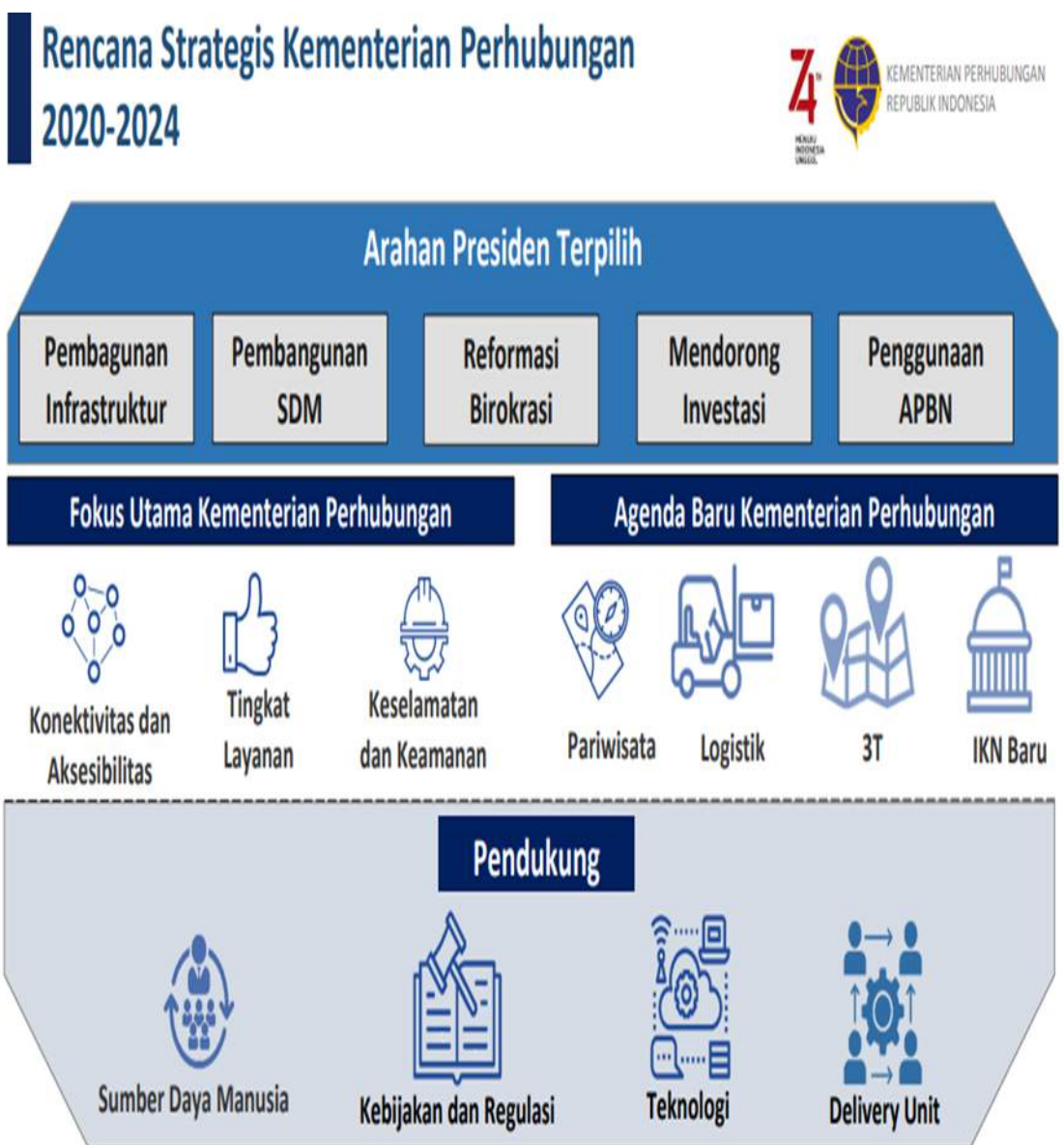
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM

3.1. TELAHAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007, menggariskan Visi Indonesia tahun 2025 yaitu INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR yang pelaksanaannya dibagi kedalam 4 (empat) tahap pembangunan jangka menengah.



Pembangunan tahun 2024 berada pada tahap jangka menengah yang ke-empat yang arahnya digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu MEWUJUDKAN MASYARAKAT INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR MELALUI PERCEPATAN PEMBANGUNAN DI SEGALA BIDANG DENGAN STRUKTUR PEREKONOMIAN YANG KOKOH BERLANDASKAN KEUNGGULAN KOMPETITIF.



3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2024

Tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan yang telah disusun untuk periode 5 (lima) tahun kedepan tahun 2021-2026 berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih yaitu sebagai berikut:

VISI

TERWUJUDNYA BATAM SEBAGAI BANDAR DUNIA MADANI YANG MODERN DAN SEJAHTERA

MISI

1. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan melalui peningkatan kualitas dan diversifikasi kegiatan perekonomian berbasis keunikan dan keunggulan wilayah
2. Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan didukung Infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang.
3. Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan Berakhlak Mulia
4. Melanjutkan percepatan pembangunan di daerah Hinterland untuk pemerataan dan sebagai penopang perekonomian Kota Batam.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, responsive, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Dinas Perhubungan berada dalam misi ke 2 (dua) yaitu ***Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan didukung Infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang*** dan misi ke 4 (empat) yaitu ***Melanjutkan Percepatan pembangunan di Daerah Hinterland untuk pemerataan dan sebagai penopang perekonomian Kota Batam.***

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Tahun 2022 merupakan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perhubungan untuk Tahun 2021-2026 yang telah disusun seperti Tabel berikut ini :

Tabel III.2
TUJUAN DAN SASARAN KERJA DINAS PERHUBUNGAN TA 2024

MISI WALIKOTA	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	TUJUAN DINAS PERHUBUNGAN	SASARAN DINAS PERHUBUNGAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET 2024
Misi 2 Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan didukung infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang	Terwujudnya infrastruktur kota yang berkualitas dan serasi dengan tata ruang Kota Batam serta berwawasan lingkungan dan memperhatikan aspek kebencanaan	Tersedianya infrastruktur perkotaan yang aman, nyaman dan terpadu serta kawasan permukiman yang layak huni	Meningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi yang Maju, Ramah, Aman dan Nyaman		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan Perkotaan	69%
				Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang Maju, Ramah, Aman dan Nyaman	Persentase sarana prasarana perhubungan yang tersedia dan terkelola di perkotaan	89%
					Persentase tersedianya angkutan umum yang layak yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kota	44%
Misi 4 Melanjutkan percepatan pembangunan didaerah hinterland untuk pemerataan dan sebagai penopang perekonomian Kota Batam	Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Memperluas Akses Hinterland	Meningkatnya konektivitas transportasi di hinterland	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Transportasi Perhubungan di wilayah hinterland		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan di wilayah hinterland	94%
				Tersedianya sarana dan prasarana transportasi di wilayah hinterland	Persentase sarana dan prasarana perhubungan yang tersedia dan terkelola di wilayah hinterland	94%
Misi 5 Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik, responsif, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, akuntabel, transparan dan mengayomi		Mewujudkan dan meningkatkan sumber daya manusia perhubungan yang memadai secara kualitas dan kuantitas			
				Tersedianya Aparatur yang profesional dan handal	Persentase Pelayanan Administrasi, sarana dan Prasarana Perkantoran yang terpenuhi	100%

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2024 sesuai Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 direncanakan berjumlah 3 (Tiga) program Perangkat Daerah, 16 (Enam Belas) Kegiatan dan 34 (Tiga puluh empat) Sub Kegiatan, yaitu sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari :
 - 1.1. Kegiatan Administrasi Keuangan
 - 1.1.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.1.2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - 1.2. Kegiatan Administrasi kepegawaian Perangkat
 - 1.2.1. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
 - 1.2.2. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - 1.3. Kegiatan Administrasi Umum
 - 1.3.1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 1.3.2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.3.3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 1.3.4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 1.3.5. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 1.4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.4.1. Sub Kegiatan Pengadaan Mebeleur
 - 1.4.2. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 1.5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1.5.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 1.5.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.6.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 1.6.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 1.6.2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 1.6.3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 1.7. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD
 - 1.7.1. Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
- 2. Program penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), terdiri dari :
 - 2.1. Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
 - 2.1.1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
 - 2.2. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 - 2.2.1. Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 - 2.2.2. Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 - 2.2.3. Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan

- 2.2.4. Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
- 2.3. Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
 - 2.3.1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
- 2.4. Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - 2.4.1. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - 2.4.2. Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - 2.4.3. Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- 2.5. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
 - 2.5.1. Sub Kegiatan Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
 - 2.5.2. Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZoSS)
- 2.6. Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
 - 2.6.1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota
- 2.7. Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.7.1. Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

3. Program Pengelolaan Pelayaran, terdiri dari :
 - 3.1. Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Dan/Atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota
 - 3.1.1. Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 3.2. Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal
 - 3.2.1. Sub Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
 - 3.2.2. Sub Kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal

TABEL III.3
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM

Tabel T.C-32

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Juta Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Juta Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah		100%	29.171.163.448,00			100%	33.023.466.213,00
1	KEGIATAN Administrasi Keuangan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	Kota Batam	100%	13.462.615.876,00	APBD		100%	14.435.484.613,00
2	KEGIATAN Administrasi kepegawaian Perangkat	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	Kota Batam	100%	227.700.000,00			100%	138.188.000,00
3	KEGIATAN Administrasi Umum	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Batam	100%	527.770.700,00	APBD		100%	443.809.300,00
4	KEGIATAN Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Kota Batam	100%	834.647.000,00			100%	145.950.000,00
5	KEGIATAN Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	Kota Batam	100%	2.865.038.376,00	APBD		100%	2.927.325.500,00
6	KEGIATAN Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	Kota Batam	100%	917.610.000,00	APBD		100%	1.048.308.800,00
7	KEGIATAN Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pelayanan BLUD yang difasilitasi sesuai ketentuan	Kota Batam	100%	10.335.781.496,00	BLUD		100%	13.884.400.000,00

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Juta Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Juta Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun		81%	37.345.152.912,00			90%	39.919.536.000,00
		Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun		4.199 Unit				4.710 Unit	
		Jumlah Jukir yang melaksanakan transaksi Non Tunai		200 Orang Jukir				300 Orang Jukir	
		Persentase Kendaraan Wajib Uji yang Lulus Uji		78%				80%	
		Persentase tingkat pelayanan Operasional Bus Trans Batam		41%				50%	
8	KEGIATAN Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Perencanaan Bidang Perhubungan yang disusun	Kota Batam	1 Dokumen	900.000.000,00	APBD		-	-
6	KEGIATAN Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Perlengkapan Jalan yang dibangun setiap tahunnya	Kota Batam	100%	3.288.571.400,00	APBD		100%	4.890.273.800,00
9	KEGIATAN Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Titik Parkir yang dikelola	Kota Batam	91%	5.458.019.500,00	APBD		96%	15.650.000.000,00
10	KEGIATAN Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Operasional Pelayanan PKB	Kota Batam	67%	960.074.000,00	APBD		70%	756.778.000,00
11	KEGIATAN Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalulintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan APILL di Persimpangan Jalan Kota	Kota Batam	85%	8.312.627.400,00	APBD		92%	6.887.319.200,00
12	KEGIATAN Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Pelaksanaan Operasi Terpadu Pengamanan Penertiban Lalu Lintas selama 1 tahun	Kota Batam	100%	194.400.000,00	APBD		100%	412.687.000,00
13	KEGIATAN Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan Operasional Bus Trans Batam (Koridor)	Kota Batam	100%	18.231.460.612,00	APBD		100%	11.322.478.000,00

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Juta Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Juta Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III.	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap transportasi laut		49%	19.152.711.564,00			49%	9.291.573.506,40
14	KEGIATAN Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pulau yang terlayani oleh transportasi laut	Kota Batam	100%	2.072.630.064,00	APBD		100%	1.659.040.000,00
15	KEGIATAN Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase prasarana perhubungan laut yang dikelola dalam kondisi baik	Kota Batam	100%	17.080.081.500,00	APBD		100%	7.632.533.506,40
					85.669.027.924,00				82.234.575.719,40

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERHUBUNGAN

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah tahun 2024 memuat program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Batam untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran.

Penyusunan kegiatan harus dilakukan secara efektif dan efisien guna memanfaatkan dana APBD dalam memenuhi kepentingan dan kebutuhan masyarakat dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun menjaring aspirasi masyarakat.

Monitoring dan evaluasi juga harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan agar diperoleh hasil yang maksimal dalam mewujudkan perencanaan pembangunan tahap berikutnya.

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perhubungan Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel IV.1 berikut :

TABEL IV.1
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERHUBUNGAN						85.669.027.924,00							82.234.575.719,40	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						85.669.027.924,00							82.234.575.719,40	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						85.669.027.924,00							82.234.575.719,40	
1.	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	100 % 100 % 100 %			100 %	29.604.703.548,00						100 % 100 % 100 %	33.023.466.213,00	
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi</i>	-			100 %	13.465.655.976,00			-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah 02. Pemba ngunan Infr astruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportas i yang merata, berkeualitas dan berkesinam bungan.	-	-	14.435.484.613,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				73 Orang/bulan	13.281.335.976,00	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah 02. Pemba ngunan Infr astruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportas i yang merata, berkeualitas dan berkesinam bungan.	-		14.292.861.613,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJU OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET REJENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				10 Dokumen	184.320.000,00	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pemba ngunan Infr astruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportas i yang merata, berkualitas dan berkesinam bungan.			142.623.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlaksana	-			100 %	227.700.000,00			-	02. Pemba ngunan Infr astruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportas i yang merata, berkualitas dan berkesinam bungan.		-	138.188.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				450 Paket	178.200.000,00	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pemba ngunan Infr astruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportas i yang merata, berkualitas dan berkesinam bungan.			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				9 Orang	49.500.000,00	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pemba ngunan Infr astruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportas i yang merata, berkualitas dan berkesinam bungan.			138.188.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah	-			100 %	958.270.700,00			-	02. Pemba ngunan Infr astruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportas i yang merata, berkualitas dan berkesinam bungan.		-	443.809.300,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					3 Paket	255.830.200,00	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pemba ngunan Infr astruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinam bungan.			32.558.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					5 Paket	103.292.500,00	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pemba ngunan Infr astruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinam bungan.			89.083.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					1 Paket	438.750.000,00	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pemba ngunan Infr astruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinam bungan.			7.330.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan					2 Paket	24.608.000,00	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pemba ngunan Infr astruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinam bungan.			21.194.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	135.790.000,00	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pemba ngunan Infr astruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinam bungan.			293.644.300,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>persentase kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi</i>	-			100 %	834.647.000,00			-	02. Pemba ngunan Infr astruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinam bungan.		-	145.950.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					30 Unit	303.876.000,00	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pemba ngunan Infr astruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportas i yang merata, berkualitas dan berkesinam bungan.			84.700.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					55 Unit	530.771.000,00	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pemba ngunan Infr astruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportas i yang merata, berkualitas dan berkesinam bungan.			61.250.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi</i>	-			100 %	2.865.038.376,00			-	02. Pemba ngunan Infr astruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportas i yang merata, berkualitas dan berkesinam bungan.		-	2.927.325.500,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					5 Laporan	994.415.000,00	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pemba ngunan Infr astruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportas i yang merata, berkualitas dan berkesinam bungan.			940.503.500,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					14 Laporan	1.870.623.376,00	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pemba ngunan Infr astruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportas i yang merata, berkualitas dan berkesinam bungan.			1.986.822.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi</i>	-			100 %	917.610.000,00			-			-	1.048.308.800,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	38.280.000,00	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				79 Unit	599.350.000,00	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pemba ngunan Infr astruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportas i yang merata, berkualitas dan berkesinam bungan.	-		806.358.800,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				62 Unit	78.600.000,00	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pemba ngunan Infr astruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportas i yang merata, berkualitas dan berkesinam bungan.	-		59.550.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				1 Unit	201.380.000,00	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pemba ngunan Infr astruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportas i yang merata, berkualitas dan berkesinam bungan.	-		182.400.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	persentase pelayanan BLUD	-			100 %	10.335.781.496,00			-	02. Pemba ngunan Infr astruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportas i yang merata, berkualitas dan berkesinam bungan.	-	-	13.884.400.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	10.335.781.496,00	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	02. Pemba ngunan Infr astruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportas i yang merata, berkualitas dan berkesinam bungan.	-		13.884.400.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Jumlah Jukir yang melaksanakan transaksi non tunai Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun Persentase Kendaraan Wajib Uji yang lulus uji Persentase lampu PJU yang Ditangani Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun Persentase tingkat pelayanan Operasional Bus Trans Batam	400 Jumlah 100 % 80 % 5,211 Unit 100 % 80 % 5211 Unit 400 Jumlah 63 % 63 % 100 %			200 Jumlah 4,199 Unit 78 % 66 % 81 % 41 %	37.345.152.912,00						400 Jumlah 100 % 80 % 5,211 Unit 100 % 80 % 5211 Unit 400 Jumlah 63 % 63 % 100 %	39.919.536.000,00	
	2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Perencanaan Bidang Perhubungan yang disusun	100 %			0 %	900.000.000,00			-	02. Pemba ngunan Infr astruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportas i yang merata, berkualitas dan berkesinam bungan.	-	0 %	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				1 Dokumen	900.000.000,00	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pemba ngunan Infr astruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportas i yang merata, berkualitas dan berkesinam bungan.	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Perengkapan Jalan yang dibangun setiap tahunnya	100 %			100 %	3.288.571.400,00			-	02. Pemba ngunan Infr astruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportas i yang merata, berkualitas dan berkesinam bungan.	-	100 %	4.890.273.800,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun				6 Unit	631.201.200,00	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pemba ngunan Infr astruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportas i yang merata, berkualitas dan berkesinam bungan.			489.027.200,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				280 Unit	1.065.728.000,00	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pemba ngunan Infr astruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportas i yang merata, berkualitas dan berkesinam bungan.			3.875.467.600,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan														
			Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				280 Unit	1.091.683.200,00	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pemba ngunan Infr astruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportas i yang merata, berkualitas dan berkesinam bungan.			253.901.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan														
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				88 Unit	499.959.000,00	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pemba ngunan Infr astruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportas i yang merata, berkualitas dan berkesinam bungan.			271.878.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Titik Parkir yang yang dikelola Jumlah Jukir yang melaksanakan transaksi Non Tunai	100 ; 80 %			91 % 100 Orang	5.458.019.500,00			-			100 ; 80 %	15.650.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Laporan	5.458.019.500,00	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.650.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Peresentase Operasional Pelayanan PKB	73 %			67 %	960.074.000,00			-	02. Pemba ngunan Infr astruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportas i yang merata, berkualitas dan berkesinam bungan.	-	73 %	756.778.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				11 Unit	510.074.000,00	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pemba ngunan Infr astruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportas i yang merata, berkualitas dan berkesinam bungan.	-		54.687.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				5000 Dokumen	125.000.000,00	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pemba ngunan Infr astruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportas i yang merata, berkualitas dan berkesinam bungan.	-		300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				3 Unit	325.000.000,00	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pemba ngunan Infr astruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportas i yang merata, berkualitas dan berkesinam bungan.	-		402.091.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan APILL di Persimpangan Jalan Kota	100 %			85 %	8.312.627.400,00			-	-	-	100 %	6.887.319.200,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0013	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)														
			Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)				2 Unit	267.209.400,00	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas														
			Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan				44 Dokumen	8.045.418.000,00	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah 02. Pemakaian Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	-		6.887.319.200,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Pelaksanaan Operasi Terpadu Pengamanan Penertiban Lalu Lintas	100 ; 63 %			100 %	194.400.000,00			-	02. Pemakaian Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	-	100 ; 63 %	412.687.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota				40 Laporan	194.400.000,00	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pemakaian Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	-		412.687.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan	Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				57 Unit	18.231.460.612,00	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pemba ngunan Infr astruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	-		11.322.478.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
3.	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase sarana dan prasarana perhubungan yang tersedia dan terkelola di wilayah hinterland	49 % 49 % 49 %			94 %	18.719.171.464,00						49 % 49 % 49 %	9.291.573.506,40	
	2.15.03.2.06	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	Persentase pulau yang terlayani oleh transportasi laut	100 %			100 %	2.072.630.064,00			-	02. Pemba ngunan Infr astruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	-	100 %	1.659.040.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.06.0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota				8 Laporan	2.072.630.064,00	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pemba ngunan Infr astruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	-		1.659.040.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	<i>Persentase prasarana perhubungan laut yang dikelola dalam kondisi baik</i>	100 %			100 %	16.646.541.400,00			-	02. Pembangunan Infrastuktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	-	100 %	7.632.533.506,40	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.12.0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal														
			<i>Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun</i>				9 Unit	15.375.258.400,00	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pembangunan Infrastuktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	-		6.938.692.000,40	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.12.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal														
			<i>Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara</i>				7 Unit	1.271.283.000,00	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pembangunan Infrastuktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	-		693.841.506,00	DINAS PERHUBUNGAN
			J U M L A H					85.669.027.924,00							82.234.575.719,40	

BAB V

PENUTUP

Rencana kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2024 ini merupakan rencana kerja tahunan yang disusun untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Batam. Penyusunan Renja Tahun 2024 ini sudah mengacu pada RPJMD dan Renstra periode Tahun 2021-2026 yang menjadi pedoman dalam penyusunan Renja dan Dokumen Anggaran Dinas Perhubungan untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Rencana kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Batam sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya.

Dengan adanya Rencana kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2024, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Perangkat Daerah diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Batam maupun dengan Perangkat Daerah yang membidangi fungsi lain.

Fomulir E.70

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Perangkat Daerah
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	✓			
2,	Pengolahan data dan informasi.	✓			
3,	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota.	✓			
4,	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan renstra- Perangkat Daerah kabupaten/kota.	✓			
5,	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	✓			
6,	Penelaahan rancangan awal RKPD kabupaten/kota.	✓			
7,	Perumusan tujuan dan sasaran.	✓			
8,	Penelaahan usulan masyarakat.	✓			
9,	Perumusan kegiatan prioritas.	✓			
10,	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	✓			
10.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.	✓			
10.b.	Memperjelas indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	✓			
10.c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	✓			
10.d.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai surat edaran bupati/wali kota.	✓			
11,	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	✓			
12,	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	✓			
13,	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	✓			
14,	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disyahkan.	✓			

Batam, 21 Juli 2023

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM



SALIM, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681021 199010 1 001



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Jenderal Sudirman No. 3 Telp. (0778) 459503 Fax. (0778) 452826 Kota Batam - 29433

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM

Nomor : 1359/KU.00.00/XII/2022

TENTANG

**TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2024
DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2023
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM**

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2021-2026, perlu disusun dokumen Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2023;
- b. bahwa apabila dalam pelaksanaan Rencana Kerja dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan maka Dinas Perhubungan diwajibkan untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja setiap tahunnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2024 dan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2023 Dinas Perhubungan Kota Batam dengan keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Perubahan

Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 53, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 108).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2024 dan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2023 Dinas Perhubungan Kota Batam, dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengumpulkan data dan informasi sebagai bahan penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2024 dan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2023;
 - b. Menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2024 dan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2023 tahapan dan tata cara yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 5 Desember 2022



LAMPIRAN : SK kepala Dinas Perhubungan
 NOMOR : 1359/HB.00.01/XII/2022
 TANGGAL : 5 Desember 2022

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
I.	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM	KETUA TIM
II.	SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM	SEKRETARIS TIM
III.	KEPALA BIDANG LALU LINTAS	KETUA POKJAI BIDANG PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
III.1.	KEPALA SEKSI MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS	ANGGOTA
III.2.	KEPALA SEKSI KESELAMATAN LALU LINTAS	ANGGOTA
III.3.	KEPALA SEKSI PENGAWASAN DAN PENERTIBAN LALU LINTAS	ANGGOTA
III.4.	KA. UPTD PELAYANAN JASA TRANSPORTASI	KOORDINATOR
III.5.	KA. TU UPTD PELAYANAN JASA TRANSPORTASI	ANGGOTA
III.6.	STAF BIDANG LALU LINTAS	ANGGOTA
III.7.	STAF UPTD PELAYANAN JASA TRANSPORTASI	ANGGOTA
IV.	KEPALA BIDANG LAUT	KETUA POKJAI II BIDANG EVALUASI
IV.1.	KEPALA SEKSI PENUNJANG KESELAMATAN PELAYARAN	ANGGOTA
IV.2.	KEPALA SEKSI KEPELABUHANAN	ANGGOTA
IV.3.	KEPALA SEKSI LALU LINTAS ANGKUTAN LAUT	ANGGOTA
IV.4.	KASUBAG KEUANGAN	ANGGOTA
IV.5.	STAF BIDANG LAUT	ANGGOTA
V.	KEPALA BIDANG ANGKUTAN JALAN	KETUA POKJAI III BIDANG STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
V.1.	KEPALA SEKSI ANGKUTAN BARANG	ANGGOTA
V.2.	KEPALA SEKSI ANGKUTAN ORANG	ANGGOTA
V.3.	KEPALA SEKSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	ANGGOTA
V.4.	KEPALA UPTD PELAYANAN PARKIR	ANGGOTA
V.5.	KEPALA TU UPTD PELAYANAN PARKIR	ANGGOTA
V.6.	STAF ANGKUTAN JALAN	ANGGOTA
V.7.	STAF UPTD PELAYANAN PARKIR	ANGGOTA

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
VI.	KEPALA BIDANG PRASARANA PERHUBUNGAN	KETUA POKJA IV BIDANG RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
VI.1.	KEPALA SEKSI PRASARANA ANGKUTAN LAUT	ANGGOTA
VI.2.	KEPALA SEKSI PERENCANAAN TEKNIS	ANGGOTA
VI.3.	KEPALA SEKSI PRASARANA LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	ANGGOTA
VI.4.	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	ANGGOTA
VI.5.	KASUBBAG PERENCANAAN PROGRAM	ANGGOTA
VI.6.	STAF BIDANG PRASARANA PERHUBUNGAN	ANGGOTA
VI.7.	STAF SEKRETARIAT DINAS PERHUBUNGAN	ANGGOTA

KEPALA DINAS



SALIM, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19681021 199010 1 001